

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konservatisme dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Standards Board*) yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Dalam hal ini diharapkan konservatisme dapat mempengaruhi manajemen laba, yang digolongkan dalam kejahatan Kacurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*).

Konservatisme adalah prinsip akuntansi yang apabila diterapkan maka akan menghasilkan laba dan aset perusahaan cenderung rendah, sedangkan angka biaya serta hutang cenderung tinggi, hal itu dikarenakan konservatisme akuntansi menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya (Savitri, 2016:23). Konservatisme akuntansi dinyatakan dengan cara *Earning/Accrual Measure* (Yenti dan Syofyan, 2013 dalam Ariyanti, 2019). *Earning/Accrual Measure* merupakan hasil antara jumlah laba bersih dari kegiatan operasional dan arus kas yang digunakan dari kegiatan operasional (Yenti dan Syofyan, 2013 dalam Ariyanti, 2019). Apabila jumlah akrual bernilai akrual negatif (laba bersih lebih kecil dibandingkan arus kas operasional) yang konsisten secara beberapa tahun maka mencerminkan adanya penerapan konservatisme akuntansi dalam perusahaan, selain itu basis akrual biasanya digunakan untuk mengukur nilai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan (Savitri, 2016:46). Diduga apabila penerapan konservatisme akuntansi semakin tinggi, maka equity valuation perusahaan juga semakin tinggi.

Konservatisme akuntansi ialah metode akuntansi yang menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam penyusunan laporan keuangan. Konservatisme akuntansi

biasanya digunakan dalam menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan optimism berlebihan yang mungkin dilakukan oleh manajemen (belkaoui, 2004:122 dalam Ningsih, 2019). Prinsip ini mengharuskan perusahaan mengakui kemungkinan rugi yang akan terjadi, namun tidak mengantisipasi laba yang direalisasi pula tidak diakui sebagai pendapatan pada periode itu (Sugiono *et al*, 2009:21 dalam Ningsih, 2019).

Penerapan prinsip konservatisme yang mendukung dalam mengatasi fenomena-fenomena yang ada dalam perusahaan seperti manajemen laba dan lainnya dibuktikan oleh penelitian - penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Prinsip konservatisme digunakan untuk hal atau lingkungan yang sifatnya tidak menentu dan memperlemah tindakan manajer untuk menurunkan laba sebelum pengumuman tanggal hibah opsi saham (Kusuma, 2014 dalam Purnamasari, 2018) dan penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Fitriany, 2010 dalam Purnamasari, 2018) mengungkapkan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap konservatisme sedangkan untuk sektor Perbankan Syariah juga dilakukan penelitian oleh (Septiana dan Irfan, 2015 dalam Purnamasari, 2018) menunjukkan bahwa konservatisme berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada Bank Syariah.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Andrianto, 2019:27). Bagi Bank Syariah, laba bukan merupakan tujuan akhir, karena yang menjadi tujuan utama adalah zakat. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, Bank Umum Syariah membutuhkan informasi akuntansi dalam menjalankan usahanya, termasuk juga perhitungan zakat yang harus dikeluarkan. Informasi bagi bank syariah memiliki pengertian pertanggungjawaban yang luas kepada Allah SWT, masyarakat, individu, maupun lingkungan. Penelitian dari (Al Abbad, 2015 dalam Purnamasari, 2018) menunjukkan bahwa Bank Islam melaporkan lebih konservatif dibandingkan Bank Konvensional karena risiko litigasi yang lebih tinggi dan bank Islam memiliki kewajiban untuk pembayaran zakat.

Menurut (Sulistiyanto, 2014 dalam Warislan, 2018) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan. Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan.

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Teori keagenan berasumsi bahwa setiap individu baik *principal* maupun *agent* memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda sehingga akan mengakibatkan adanya konflik kepentingan diantara mereka. Manajemen laba memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri maupun perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Oleh karena itu, manajer akan berusaha untuk memberikan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya manajemen laba adalah tidak diterapkannya prinsip konservatisme pada perusahaan. (Warislan, 2018)

Susanto (2016), menyebutkan Ukuran perusahaan merupakan besarnya perusahaan dilihat dari total asetnya. Susanto (2016) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar juga penetapan pajak untuk perusahaan tersebut sehingga manajer lebih memilih untuk mengurangi laba.

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh risiko perusahaan yang juga semakin tinggi (Agustina *et al*, 2015 dalam Mamesah, 2016). Risiko tersebut terkait dengan biaya politis yang mungkin harus dikeluarkan perusahaan. Perusahaan akan berhati-hati dalam menyajikan angka dalam laporan keuangannya untuk menghindari biaya politis seperti pajak. Semakin rendah angka *debt to equity ratio* maka akan semakin baik, karena akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar

seluruh kewajibannya (Suprihastini, 2007 dalam Mamesah, 2016). *Debt/equity hypothesis* dalam teori akuntansi positif menyatakan perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan agar laporan keuangan terlihat baik dimata *stakeholders* (Watts dan Zimmerman, dalam Mamesah, 2016), namun dengan keadaan tersebut kreditor dan mekanisme *good corporate governance* akan mengawasi tindakan manajer agar berhati-hati dalam menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan.

PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. (Savitri, 2016: 25)

Arus kas operasi memiliki relevansi nilai apabila secara statistik memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap harga saham (Chaslim, 2018). Perusahaan yang konservatif yang menyajikan aset dan laba yang kecil akan lebih menarik para investor ketika arus kas yang dihasilkan tinggi dan arus kas operasi berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi (Ardina dan Indira, 2012 dalam Purnamasari, 2018).

Menurut Rosdini and Fildzah (2019) Bank konvensional cenderung lebih konservatif dibandingkan bank syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kredit macet dan cadangan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang menunjukkan bahwa kebijakan kredit bank

konvensional dalam cadangan dan pencadangan lebih konservatif daripada bank syariah.

Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan aturan syariah. Adanya kewajiban membayar zakat yang harus dilakukan oleh Bank Umum Syariah sehingga membuat perusahaan ini harus lebih konservatif. Bank Umum Konvensional yang profit oriented dimana mereka harus mendapatkan laba semaksimal mungkin agar mereka mendapatkan bonus dari pencapaian laba yang besar tersebut membuat laporan keuangan yang dilaporkan juga tidak konservatif tetapi Bank Umum Konvensional juga dapat melaporkan laba yang konservatif dengan alasan-alasan tertentu misalnya untuk mengurangi pajak, biaya litigasi dan metode yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tingkat konservatisme dalam Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional memiliki perbedaan sebagai akibat dari adanya perbedaan alasan dalam pemilihan penggunaan prinsip konservatisme akuntansi (Purnamasari, 2018).

Fenomena pertama yang di pakai saat ini adalah Bank Muamalat. Dalam laporan keuangan perseroan, periode Januari-Agustus 2019, laba bersih Bank Muamalat tercatat hanya mencapai Rp 6,57 miliar. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya (Januari-Agustus 2018), laba bersih perusahaan mencapai 110,9 miliar. Dalam 8 bulan pertama tahun 2019, laba bersih perusahaan anjlok hingga 94,1% secara tahunan. Laba bersih yang hanya senilai Rp 6,57 miliar tersebut merupakan perolehan laba bersih terendah dalam 8 bulan pertama yang pernah dicatatkan oleh Bank Muamalat, setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Ambruknya laba bersih perusahaan terjadi seiring dengan tekanan terhadap pos pendapatan utama perusahaan. (cnbcindonesia.com)

Fenomena kedua yang di pakai saat ini adalah kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah ke PT Hastuka Sarana Karya (HSK). Dalam kasus tersebut, Bank BJB Syariah telah menyalurkan kredit ke

PT HSK periode 2014-2016 senilai Rp548 miliar. Dana itu digunakan PT HSK untuk membangun 161 ruko di Garut Super Blok. Akan tetapi, anak usaha Bank BJB itu tidak memiliki agunan dari kredit yang disalurkan. Sementara itu, kredit tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA). (finansial.bisnis.com).

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas, penulis akan meneliti tentang konservatisme bank umum syariah dan bank umum konvensional dengan membandingkan 10 bank yang masing-masing memiliki bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur dengan metode *Accrual Measures* dari Givoly dan Hayn. Penelitian ini oleh penulis dijadikan sebagai skripsi dengan judul “**Analisis Perbandingan Tingkat Konservatisme Akuntansi Pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia**”.

1.2. Perumusan Masalah

Apakah ada perbedaan tingkat konservatisme akuntansi Pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan perbedaan tingkat konservatisme akuntansi Pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kontribusi penelitian ini terhadap pembacanya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dalam bidang teoritis:
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang konservatisme akuntansi di Indonesia.
 - b. Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan tingkat konservatisme akuntansi Bank umum syariah dan Bank umum konvensional di Indonesia.

- c. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk Bank Syariah, sehingga praktek konservatisme diharapkan akan lebih diterapkan oleh Bank umum Syariah.
2. Manfaat dalam bidang praktis:
 - a. Bisa memberikan informasi serta pengetahuan yang akan bermanfaat bagi Bank Syariah.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan dan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas tentang berbagai kinerja perbankan syariah yang terdapat di seluruh Indonesia.